

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN SAMPAH OLEH DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN DI KECAMATAN MAULafa KOTA
KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Natalia Fentia Klau

32.0666

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email : 32.0666@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Andi Masrich, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *The problem of waste management in Kupang City, especially in Maulafa District, is a significant environmental issue. This is caused by the increasing volume of waste every year, low public awareness, and suboptimal implementation of regional policies. This condition has an impact on the decline in environmental quality and public health in urban areas. Purpose :* *This study aims to analyze the implementation of waste management policies by the Environmental and Sanitation Service in Maulafa District, identify supporting and inhibiting factors, and formulate strategies to increase policy effectiveness through a participatory and systematic approach. Method:* *This study uses a qualitative descriptive approach with a case study method. Data collection techniques are carried out through interviews, observations, and documentation. Data analysis is carried out using the Van Meter and Van Horn (1975) policy implementation theory which includes six dimensions: policy standards and targets, resources, characteristics of implementing agents, attitudes of implementers, communication between implementing organizations, and social, economic, and political conditions. Result:* *The implementation of waste management policies in Maulafa District shows that although the policy has been formulated comprehensively through Regional Regulation Number 3 of 2011, its implementation still encounters a number of obstacles. These obstacles include limited human resources and infrastructure, weak cross-sector coordination, and low active community participation. Supporting factors include the availability of management facility programs such as waste banks and TPS3R, as well as environmental awareness campaign efforts. Conclusion:* *The implementation of waste management policies in Maulafa District has referred to the applicable Regional Regulations and has set clear standards of success. The implementation of waste management policies in Maulafa District requires strengthening human resource capacity, improving waste infrastructure, and increasing communication and collaboration between the government and the community. Increasing the effectiveness of policy implementation can be achieved through a more participatory, educational, and integrated approach to realizing sustainable waste management.*

Keywords: *policy implementation, waste, Environmental Service, Maulafa District, Van Meter and Van Horn*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): *Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Kupang, khususnya di Kecamatan Maulafa, merupakan isu lingkungan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya volume sampah setiap tahunnya, rendahnya kesadaran masyarakat, dan belum optimalnya implementasi kebijakan daerah. Kondisi ini berdampak pada penurunan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat di kawasan urban. Tujuan:* *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Maulafa, mengidentifikasi faktor*

pendukung dan penghambatnya, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan melalui pendekatan partisipatif dan sistematis. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) yang mencakup enam dimensi: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. **Hasil/Temuan:** Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Maulafa menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah dirumuskan secara komprehensif melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011, pelaksanaannya masih menemui sejumlah kendala. Kendala tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta rendahnya partisipasi aktif masyarakat. Faktor pendukung meliputi tersedianya program fasilitas pengelolaan seperti bank sampah dan TPS3R, serta adanya upaya kampanye kesadaran lingkungan. **Kesimpulan:** Implementasi kebijakan penanganan sampah di Kecamatan Maulafa sudah mengacu pada Peraturan Daerah yang berlaku dan telah menetapkan standar keberhasilan yang jelas. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Maulafa memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur persampahan, serta peningkatan komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Peningkatan efektivitas implementasi kebijakan dapat dicapai melalui pendekatan yang lebih partisipatif, edukatif, dan terintegrasi guna mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, sampah, Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan Maulafa, Van Meter dan Van Horn

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan sampah merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di Kota Kupang, pengelolaan sampah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Peraturan ini mewajibkan masyarakat untuk mengelola sampah dengan baik, termasuk memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai tantangan, terutama rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik.

Sampah menjadi salah satu penyebab utama lingkungan menjadi tidak bersih dan sehat. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, volume sampah juga ikut meningkat. Indonesia memiliki populasi sebesar 278.696.200 jiwa, yang berkontribusi terhadap peningkatan produksi sampah nasional. Faktor lain seperti penggunaan plastik, keterbatasan infrastruktur, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat turut memengaruhi jenis dan jumlah timbulan sampah. Kota Kupang, sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan wilayah dengan volume sampah tertinggi di provinsi tersebut. Kota Kupang bahkan sempat dinobatkan sebagai kota terkotor dalam kategori kota sedang.



Gambar 1.1 Jumlah Timbunan Sampah Provinsi NTT 2024

Kondisi pengelolaan sampah di Kota Kupang semakin diperparah dengan insiden kebakaran di TPA Alak pada Oktober–November 2023 yang menghancurkan sekitar 75% fasilitas dan menghambat proses penanganan sampah (SIPSN, 2025). Selain itu, volume sampah yang terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk menuntut adanya kebijakan pengelolaan yang lebih efektif dan terencana. Kecamatan Maulafa menjadi wilayah dengan jumlah timbunan sampah tertinggi di Kota Kupang. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sebesar 74,62 km² dan jumlah penduduk mencapai 109.872 jiwa (BPS Kota Kupang, 2023), sehingga menghasilkan sampah dalam jumlah besar dari berbagai sumber.

Penanganan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat. Pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada teknologi, melainkan juga pada perilaku sosial. Pemerintah Kota Kupang telah menyediakan berbagai fasilitas pendukung seperti bank sampah dan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle), serta mengedepankan pendekatan 3R dalam Perda Nomor 3 Tahun 2011. Namun, pelaksanaan konsep ini masih belum optimal karena kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Menurut Sahupala (2020), sampah adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, dan persoalannya tidak akan selesai tanpa adanya peran aktif masyarakat.

Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kupang, khususnya di Kecamatan Maulafa, juga mengalami hambatan dari sisi pelaksanaan. Petugas pengumpul dan pengangkut sampah memiliki peran penting dalam implementasi prinsip 3R, namun pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala teknis dan non-teknis. Dalam praktiknya, pemilahan sampah belum

berjalan maksimal, dan pengangkutan masih dilakukan secara campuran, yang bertentangan dengan amanat Pasal 10 dan Pasal 15 Perda tersebut. Puspita et al. (2023) menyatakan bahwa kebijakan seharusnya dapat menghasilkan output berupa penurunan jumlah sampah, namun pelaksana kebijakan belum optimal akibat kurangnya pembinaan, komunikasi yang lemah, minimnya tenaga ahli, serta keterbatasan anggaran (Sahupala, 2020).

Secara keseluruhan, Kecamatan Maulafa menggambarkan kompleksitas persoalan pengelolaan sampah yang mencakup aspek teknis, sosial, dan kelembagaan. Tingginya volume sampah, ditambah dengan ketidakefisienan sistem pengelolaan dan keterbatasan infrastruktur, memperparah kondisi lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti edukasi dan kampanye kesadaran, pengembangan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, peningkatan fasilitas pengolahan, serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

1.2 Gap Penelitian

Meskipun Pemerintah Kota Kupang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, implementasi kebijakan tersebut di lapangan masih jauh dari optimal. Berbagai upaya telah dilakukan, seperti pengadaan fasilitas pengelolaan sampah (bank sampah dan TPS3R), penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), serta pelibatan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi. Namun, permasalahan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, serta kurangnya pengawasan dan evaluasi kebijakan masih menjadi hambatan utama. Kecamatan Maulafa menjadi contoh nyata dari kondisi ini, di mana volume sampah terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, namun sistem pengelolaan yang tersedia belum mampu mengimbangi kebutuhan. Selain itu, peristiwa kebakaran di TPA Alak semakin menegaskan bahwa pengelolaan sampah di Kota Kupang belum memiliki ketahanan sistem yang memadai. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan yang signifikan antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan pelaksanaan di lapangan, yang menjadi alasan perlunya analisis lebih lanjut terhadap implementasi kebijakan penanganan sampah, khususnya di Kecamatan Maulafa.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti dengan pendekatan dan fokus yang berbeda-beda. Putri dan Yuliani (2024) meneliti implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh UPT Pengelolaan Sampah di Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, dan menemukan bahwa pelaksanaan belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana prasarana. Supriatna et al. (2024) meneliti kasus serupa di Kota Cimahi dan menemukan bahwa faktor komunikasi, birokrasi, dan perilaku masyarakat sangat memengaruhi efektivitas kebijakan. Penelitian Al khumairoh et al. (2024) di TPA Jatibarang, Kota Semarang, mengungkapkan bahwa implementasi Perda masih menghadapi tantangan seperti kurangnya fasilitas dan rendahnya kesadaran masyarakat. Sementara itu, Sahupala (2020) mencatat bahwa meskipun sosialisasi sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Tasikmalaya, implementasinya belum maksimal karena lemahnya SOP dan keterbatasan dana.

Selain itu, studi yang lebih berfokus pada partisipasi masyarakat dan inovasi kebijakan turut memperkaya diskursus. Ulhasanah et al. (2025) menggunakan metode SEM untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam program bank sampah di pusat transportasi publik dan menekankan pentingnya adaptabilitas individu serta dukungan digital. Fatmawati et al. (2022) menekankan pentingnya komunikasi kolaboratif antar pemangku kepentingan dalam

efektivitas bank sampah di Makassar dan Bantaeng. Kubota et al. (2020) menyoroti integrasi bank sampah komunitas ke dalam kebijakan kota melalui pembentukan bank sampah pusat sebagai penghubung ekosistem daur ulang. Studi di Kuala Lumpur oleh Chook et al. (2024) mengungkap perlunya pendekatan berbasis etnis dan wilayah dalam pengelolaan sampah plastik, sedangkan Zwane dan Schoeman (2025) menunjukkan bahwa pelatihan pemulung dalam perbaikan e-waste meningkatkan keterampilan dan mendukung strategi pengelolaan sampah elektronik yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh aspek struktural, partisipatif, teknologi, dan pendekatan kontekstual yang tepat.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah dibandingkan dengan sejumlah studi sebelumnya yang telah meneliti implementasi kebijakan pengelolaan sampah di berbagai daerah. Misalnya, Putri dan Yuliani (2024) menyoroti kendala internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dalam pelaksanaan kebijakan di Kecamatan Bukit Batu, namun belum mengaitkannya dengan kerangka teori yang sistematis. Berbeda dengan itu, penelitian ini menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn (1975) yang mencakup enam dimensi penting, sehingga memberikan analisis yang lebih komprehensif. Supriatna et al. (2024) menekankan pengaruh birokrasi dan perilaku masyarakat di Kota Cimahi, tetapi belum merumuskan strategi peningkatan efektivitas sebagaimana dilakukan dalam penelitian ini melalui pendekatan partisipatif dan edukatif. Sementara Al Khumairoh et al. (2024) memfokuskan kajian pada pelaksanaan Perda di TPA Jatibarang, penelitian ini mengkaji pelaksanaan kebijakan secara lebih luas di tingkat kecamatan, termasuk peran dinas terkait serta interaksi dengan masyarakat. Penelitian Sahupala (2020) di Tasikmalaya menyoroti lemahnya sosialisasi dan SOP, namun tidak secara mendalam membahas koordinasi lintas sektor atau pendekatan kolaboratif yang menjadi fokus penelitian ini. Selain itu, penelitian-penelitian seperti Ulhasanah et al. (2025), Fatmawati et al. (2022), dan Kubota et al. (2020) lebih menitikberatkan pada aspek partisipasi masyarakat dan program bank sampah, dengan pendekatan kuantitatif atau studi institusional, berbeda dari pendekatan kualitatif studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini yang mengeksplorasi langsung dinamika pelaksanaan kebijakan daerah. Penelitian Chook et al. (2024) yang menggunakan eksperimen pilihan dan Zwane & Schoeman (2025) yang berfokus pada pelatihan e-waste, memiliki fokus isu dan konteks geografis yang sangat berbeda. Dengan demikian, kebaruan utama dari penelitian ini terletak pada pemilihan lokasi studi yang belum banyak diteliti, yaitu Kecamatan Maulafa di Kota Kupang, penggunaan teori implementasi kebijakan secara mendalam, serta formulasi strategi kebijakan berbasis kondisi lokal yang bertujuan memperkuat efektivitas pengelolaan sampah secara partisipatif dan berkelanjutan.

1.5 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan penanganan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam proses implementasi kebijakan penanganan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Pendekatan kualitatif ini berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau paradigma interpretatif, yang menegaskan bahwa suatu realitas atau objek tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecah ke dalam beberapa variabel saja (Ridwan & Tungka, 2024). Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengungkap fenomena sosial yang kompleks dan kontekstual, serta memungkinkan peneliti mengeksplorasi makna, proses, dan dinamika pelaksanaan kebijakan secara lebih menyeluruh (Wachid & Caesar, 2021). Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau membuat prediksi, melainkan untuk memahami kondisi lapangan berdasarkan fakta empiris.

Penelitian ini menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) yang menekankan enam dimensi utama dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan, yaitu: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Penggunaan teori ini memberikan struktur analisis yang sistematis dan mendalam untuk memahami hambatan dan pendukung implementasi kebijakan secara menyeluruh, sekaligus membantu merumuskan strategi yang relevan untuk perbaikan kebijakan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan terkait implementasi kebijakan penanganan sampah, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, arsip kebijakan, laporan kegiatan, dan sumber-sumber pendukung lainnya (Sugiyono, 2017). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama: wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi (Sugiyono, 2009; Kusuma, 1987; Sulistyono-Basuki, 2006). Dalam teknik wawancara, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu menyiapkan pedoman wawancara, menyiapkan alat untuk wawancara, serta mengatur waktu wawancara agar proses berlangsung efektif dan efisien (Simangunsong, 2017:215). Pendekatan wawancara mendalam ini umumnya lebih sesuai dan efisien dalam situasi di mana jumlah responden relatif terbatas (Nurdin & Hartati), sehingga sangat cocok dengan kebutuhan penelitian ini yang mengutamakan kualitas informasi.

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling (Hamdi, 2014). Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan yang dianggap memiliki kapasitas, pengetahuan, dan pengalaman langsung dalam kebijakan penanganan sampah, seperti Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, serta Sub Koordinator Penanganan Sampah. Mereka merupakan informan kunci karena memiliki otoritas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Selain itu, petugas TPA, petugas pengumpul dan pengangkut sampah, pengawas lapangan, serta pengelola bank sampah juga diwawancarai untuk memperoleh informasi teknis dan operasional. Teknik snowball digunakan untuk menjangkau masyarakat penerima manfaat, yang memberikan perspektif pengguna kebijakan dan dampaknya di tingkat akar rumput.

Untuk menganalisis data, digunakan model analisis interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi tiga tahapan utama: data condensation (pemadatan data) untuk menyaring informasi penting dari hasil pengumpulan data, data display (penyajian data) dalam bentuk narasi dan tabel agar data lebih mudah dipahami, serta drawing and verifying

conclusions (penarikan dan verifikasi kesimpulan) guna merumuskan hasil yang valid dan menjawab rumusan masalah secara komprehensif. Model ini dipilih karena bersifat dinamis dan fleksibel dalam menangani data kualitatif yang kompleks serta memungkinkan pengolahan data secara simultan selama proses penelitian berlangsung. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai bagaimana kebijakan penanganan sampah diimplementasikan di Kecamatan Maulafa, serta mengidentifikasi tantangan, peluang, dan strategi perbaikan yang kontekstual dan aplikatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Maulafa Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kebijakan penanganan sampah di Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 yang mengatur penyelenggaraan penanganan sampah rumah tangga dan sejenisnya. Proses penanganan sampah secara ideal terdiri dari beberapa tahap, yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir. Namun, dalam praktiknya di Kota Kupang, proses pengelolaan sampah belum diterapkan secara optimal.

Penulis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975) untuk mengkaji keberhasilan implementasi kebijakan penanganan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Maulafa Kota Kupang berdasarkan 6 Dimensi dengan 11 indikator yang saling mempengaruhi dan berkesinambungan satu sama lain. Dimensi dan indikator dalam teori Van Meter dan Van Horn (1975) sebagai berikut:

3.1 Standar dan Sasaran Kebijakan

1. Standar Kebijakan dalam implementasi kebijakan

Standar keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kupang diukur dari beberapa indikator utama, yaitu pengurangan volume sampah yang dihasilkan, tingkat daur ulang sampah, serta frekuensi pengangkutan sampah. Sasaran kebijakan disusun melalui partisipasi masyarakat, pemerintah, dan stakeholder terkait agar tercapai hasil yang optimal dan berkelanjutan. Menurut Sub Koordinator Substansi Penanganan Sampah, Bapak Meksy Pingak, standar keberhasilan ini meliputi pencapaian target pengurangan sampah, tingkat kepuasan masyarakat, serta peningkatan kualitas lingkungan khususnya di Kecamatan Maulafa, yang merupakan daerah dengan penghasil sampah terbanyak. Kriteria ini membantu memberikan gambaran yang jelas tentang dampak positif kebijakan tersebut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Bapak Max Mahury, menambahkan bahwa keberhasilan juga tergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana pendukung seperti tempat penampungan sampah, alat angkut, dan fasilitas pengolahan sampah. Selain itu, kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi faktor penting untuk mewujudkan standar keberhasilan tersebut. Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bapak Ahmad Likur, menekankan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat serta pelaksanaan program yang efektif agar lingkungan menjadi bersih dan sehat. Pencapaian standar kebijakan ini tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara sosial dan ekonomi.

Secara keseluruhan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang menetapkan standar keberhasilan kebijakan penanganan sampah yang meliputi pengurangan sampah, kepuasan masyarakat, dan kualitas lingkungan yang lebih baik. Ketersediaan fasilitas dan kesadaran masyarakat merupakan kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut, sehingga kebijakan ini tidak hanya berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan, tetapi juga pada

peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi di Kota Kupang, khususnya Kecamatan Maulafa.

2. Kinerja Kebijakan

Kinerja kebijakan mengacu pada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan sampah di Kota Kupang, keberhasilan kebijakan diukur dari jumlah sampah yang berhasil dikurangi dan peningkatan tingkat daur ulang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang menekankan pentingnya evaluasi melalui umpan balik masyarakat untuk memastikan kebijakan yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan warga.

Selain itu, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bapak Achmad Likur, menyoroti pentingnya efisiensi dalam penggunaan sumber daya, tidak hanya dari segi biaya tetapi juga waktu dan tenaga kerja. Penggunaan armada pengangkut yang efisien serta sistem pemungutan sampah yang terjadwal dengan baik menjadi upaya penting dalam meningkatkan efisiensi operasional kebijakan pengelolaan sampah. Keterlibatan aktif masyarakat juga dianggap sangat krusial oleh Sub Koordinator Substansi Penanganan Sampah, Bapak Meksy Pingak. Partisipasi masyarakat dalam program daur ulang dan kampanye kebersihan menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan harus dilakukan agar kesadaran dan partisipasi masyarakat dapat maksimal.

Secara keseluruhan, kinerja kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kupang membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan pengukuran hasil secara tepat, efisiensi sumber daya, partisipasi masyarakat yang aktif, serta inovasi dalam pelaksanaan program. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan serta kesehatan masyarakat di Kota Kupang.

3.2 Sumber daya

1. Sumberdaya non manusia

Sumber daya non manusia mencakup infrastruktur, fasilitas, dan sarana prasarana yang sangat penting untuk mendukung proses pengelolaan sampah secara efektif. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bapak Achmad Likur, menjelaskan bahwa elemen utama sumber daya non manusia meliputi tempat penampungan sampah (TPS), Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta peralatan seperti truk pengangkut sampah yang efisien. Penggunaan truk yang tepat waktu dan rutin menjadi kunci dalam memastikan pengangkutan sampah berjalan lancar.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Bapak Max Mahury, juga menegaskan pentingnya infrastruktur fisik yang memadai dan terdistribusi dengan baik di lokasi strategis agar masyarakat mudah dalam membuang sampah ke TPS. Infrastruktur yang baik menjadi komponen krusial dalam proses penanganan sampah di Kecamatan Maulafa. Selain itu, Sub Koordinator Substansi Penanganan Sampah, Bapak Meksy Pingak, menyampaikan bahwa pengelolaan sampah yang efektif membutuhkan integrasi antara infrastruktur, peralatan, dan partisipasi masyarakat. Namun, tantangan seperti keterlambatan pengangkutan yang disebabkan oleh kondisi cuaca terkadang menimbulkan keluhan dari masyarakat terkait pelayanan yang kurang optimal. Secara keseluruhan, sumber daya non manusia berupa infrastruktur, fasilitas, dan sarana prasarana merupakan elemen penting yang harus dikelola dengan baik untuk mendukung pengelolaan sampah yang efektif di Kota Kupang, khususnya di Kecamatan Maulafa.

2. Sumber daya manusia yang memadai

Sumber daya manusia (SDM) memiliki peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Bapak Max Mahury, menekankan bahwa kualitas dan kompetensi pegawai sangat krusial, dimana mereka harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan dalam bidang pengelolaan lingkungan, seperti teknik pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan. Selain itu, jumlah pegawai yang memadai juga diperlukan untuk menangani berbagai aspek pengelolaan sampah secara efektif. Menurut Sub Koordinator Substansi Penanganan Sampah, Bapak Meksy Pingak, peningkatan kompetensi SDM dilakukan melalui pelatihan khusus, seperti pelatihan pembuatan pupuk organik, kerajinan dari sampah plastik, serta pelatihan operator alat berat untuk petugas dan pengawas di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Namun, tidak semua pegawai di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mendapat pelatihan khusus tersebut.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bapak Achmad Likur, menyampaikan bahwa untuk petugas lapangan seperti pengangkut dan pengumpul sampah, keahlian khusus tidak menjadi syarat utama. Yang lebih penting adalah niat kerja serta kondisi kesehatan mental dan jasmani yang baik agar dapat melaksanakan tugas secara efektif. Dari hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang sesuai sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas SDM dalam pengelolaan sampah. Pelatihan menjadi bagian penting dalam pengembangan kompetensi pegawai, meskipun untuk petugas lapangan kesehatan dan semangat kerja menjadi faktor kunci dalam efektivitas pelaksanaan tugas mereka.

3.3 Karakteristik Organisasi Pelaksana

1. Bekerja sesuai SOP

SOP merupakan serangkaian langkah yang dijadikan standar untuk mencapai tujuan tertentu, bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Bapak Max Mahury, menyampaikan bahwa SOP yang diterapkan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 dan 4 Tahun 2011, yang menjadi acuan dalam menilai keberhasilan dan ketepatan sasaran kebijakan. SOP ini mengatur agar proses pengangkutan sampah dapat berjalan tertib dan kerja sama antar pihak dapat terjalin dengan baik. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bapak Achmad Likur, menambahkan bahwa sesuai dengan SOP tersebut, Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab dalam pengangkutan dan pemrosesan akhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sementara masyarakat berperan aktif dalam pemilahan dan pengumpulan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS). Menurut Sub Koordinator Substansi Penanganan Sampah, Bapak Meksy Pingak, pelaksanaan SOP secara umum sudah sesuai prosedur, namun ada kendala seperti keterlambatan jadwal pengangkutan akibat cuaca buruk yang menyebabkan penumpukan sampah dan keluhan dari masyarakat. Pengawas lapangan, Ibu Munny Nenno, juga menyatakan bahwa meskipun berusaha mengikuti SOP dengan baik, sering kali di lapangan terdapat kendala seperti keterlambatan armada dan situasi tidak terduga yang mempengaruhi kelancaran proses pengangkutan hingga ke TPA Alak. Dari hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa SOP di Dinas Lingkungan Hidup Kota Kupang sudah dibuat dan dijalankan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Pelaksanaan SOP yang jelas dan terstruktur membantu petugas pengangkut, pengumpul, dan pengawas dalam menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien, meskipun tantangan di lapangan tetap perlu diantisipasi agar pelayanan pengelolaan sampah semakin optimal.

2. Keterampilan dan kemampuan pelaksana

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang telah menjalankan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan tim pelaksana dalam pengelolaan sampah. Kepala Dinas, Bapak Max Mahury, menyatakan bahwa keterampilan pelaksana secara umum sudah cukup baik, namun perlu terus ditingkatkan terutama dalam manajemen waktu dan penggunaan teknologi modern. Hal ini penting mengingat volume sampah di Kecamatan Maulafa yang terus meningkat tiap tahun. Program yang berjalan saat ini juga meliputi pengelolaan sampah organik dan daur ulang, mengingat banyaknya sampah organik yang berasal dari pasar dan rumah tangga.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bapak Achmad Likur, menambahkan bahwa tim pelaksana cukup kompeten dalam menjalankan tugasnya meski menghadapi tantangan fluktuasi jumlah sampah. Selain itu, pelatihan berbasis komunitas sedang digalakkan untuk memberdayakan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah agar turut berkontribusi dalam pengelolaan sampah. Sub Koordinator Substansi Penanganan Sampah, Bapak Meksy Pingak, menyatakan bahwa tim pelaksana mampu beradaptasi dengan baik terhadap kondisi lokal, namun masih membutuhkan peningkatan keterampilan teknis. Pelatihan yang pernah dilakukan meliputi pembuatan pupuk organik, kerajinan dari bahan plastik, dan pengoperasian alat berat di TPA. Pengawas lapangan, Ibu Munny Nenzo, mengungkapkan bahwa untuk pengembangan keterampilan, pengawas pernah melakukan studi banding ke Surabaya untuk mempelajari proses penanganan sampah di sana. Namun, tantangan yang sering dihadapi adalah kurangnya koordinasi antara tim pelaksana dan pihak terkait, yang menyebabkan hambatan dalam proses pengangkutan sampah. Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun keterampilan dan kemampuan pelaksana sudah baik, peningkatan masih diperlukan terutama dalam aspek manajemen waktu, teknologi, dan koordinasi antar tim agar pengelolaan sampah dapat lebih optimal, terutama dengan semakin meningkatnya volume sampah di Kecamatan Maulafa.

3.4 Sikap Para Pelaksana

1. Pemahaman kebijakan

Para pelaksana umumnya memiliki pengetahuan dasar yang baik mengenai isi dan tujuan kebijakan pengelolaan sampah. Namun, ada variasi dalam tingkat pemahaman, khususnya terkait aspek teknis dan prosedural seperti manajemen waktu dan penggunaan teknologi yang masih perlu penguatan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Bapak Max Mahury, menyatakan bahwa pemahaman pelaksana secara umum sudah memadai, tetapi masih ada kesenjangan dalam penerapan teori ke praktik sehari-hari. Oleh karena itu, beliau berencana mengadakan pelatihan dan workshop secara berkala yang mencakup aspek teori dan praktik lapangan, sehingga pelaksana dapat belajar langsung dari situasi nyata. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bapak Achmad Likur, menambahkan bahwa pelaksana menunjukkan kemajuan dalam menghadapi tantangan, namun keterampilan teknis masih perlu ditingkatkan. Pelatihan dan pendampingan terus dilakukan agar petugas lebih memahami peran dan tanggung jawabnya dalam program pengurangan sampah. Sub Koordinator Substansi Penanganan Sampah, Bapak Meksy Pingak, menggarisbawahi pentingnya evaluasi berkala untuk mengukur pemahaman pelaksana dan memberikan koreksi bila diperlukan.

Sementara itu, pengawas lapangan, Ibu Munny Nenzo, menyatakan bahwa petugas lapangan sudah memiliki akses informasi yang cukup melalui pertemuan rutin dan diskusi, walaupun sosialisasi tambahan masih diperlukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Kesimpulannya, pemahaman pelaksana terhadap kebijakan pengelolaan sampah di

Kota Kupang sudah berada pada tingkat memadai, namun perlu didukung dengan pelatihan dan workshop yang rutin serta evaluasi berkala agar pemahaman ini terus meningkat dan dapat diterapkan secara optimal di lapangan.

2. Tanggapan kebijakan

Secara umum, tanggapan para pelaksana terhadap kebijakan penanganan sampah cenderung positif. Mereka menyadari bahwa kebijakan ini sangat penting untuk menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan, serta hal ini meningkatkan semangat kerja dan kolaborasi di lapangan. Namun, terdapat juga sejumlah keluhan dan ketidakpuasan dari sebagian petugas terkait keterbatasan sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan dengan optimal. Ketidaktersediaan fasilitas, peralatan, maupun dukungan pendanaan yang memadai menjadi sumber kekhawatiran dan penolakan sebagian pelaksana. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Bapak Max Mahury, menyatakan bahwa meskipun dukungan terhadap kebijakan cukup kuat, ketidaktersediaan sumber daya dapat memperlambat pelaksanaan di lapangan. Sub Koordinator Substansi Penanganan Sampah, Bapak Meksy Pingak, mengamati bahwa pelaksana secara umum mendukung kebijakan karena manfaat jangka panjangnya, namun ada keraguan terkait kemampuan mereka mengikuti seluruh ketentuan kebijakan tanpa pelatihan dan dukungan memadai, yang dapat menimbulkan resistensi. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bapak Achmad Likur, menyampaikan bahwa sebagian pelaksana skeptis terkait kesiapan implementasi kebijakan karena kekhawatiran beban kerja yang semakin berat tanpa dukungan tambahan, yang dapat menurunkan produktivitas.

Pengawas lapangan, Ibu Munny Nenno, menambahkan bahwa meskipun sebagian besar pelaksana sangat mendukung, beberapa merasa terbebani dengan tanggung jawab tambahan tanpa peningkatan fasilitas dan peralatan, sehingga ketidakpuasan ini dapat mengganggu alur kerja. Petugas TPA dan petugas pengumpul sampah juga menyampaikan dukungan yang kuat terhadap kebijakan, namun merasa perlunya penyesuaian kebijakan dengan kapasitas dan kondisi lapangan, serta adanya penolakan yang muncul karena keterbatasan sumber daya yang dirasakan.

3.5 Komunikasi antar pelaksana

1. Komunikasi kepada agen pelaksana harus konsisten

Komunikasi yang konsisten kepada agen pelaksana merupakan aspek penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kupang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Bapak Max Mahury, menyatakan bahwa komunikasi yang rutin dan berkesinambungan melalui pertemuan, laporan, dan diskusi lapangan sangat membantu memastikan bahwa seluruh pelaksana memahami tugas dan prosedur sesuai kebijakan yang berlaku. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bapak Achmad Likur, menambahkan bahwa ketidakkonsistenan komunikasi dapat menimbulkan kebingungan dan menurunkan kinerja, sehingga perlu adanya mekanisme komunikasi yang sistematis agar setiap petugas mendapatkan informasi terbaru dan arahan yang jelas. Selain itu, pengawas lapangan, Ibu Munny Nenno, mengungkapkan bahwa komunikasi terbuka dan tepat waktu sangat mendukung efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan, terutama saat ada perubahan jadwal atau prosedur. Dengan komunikasi yang konsisten, pelaksana dapat menjalankan tugas secara efektif, berkoordinasi dengan baik, dan menyelesaikan masalah di lapangan dengan cepat, sehingga mendukung tercapainya tujuan kebijakan pengelolaan sampah secara optimal.

3.6 Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

1. Sumber daya ekonomi lingkungan yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan

Sumber daya ekonomi lingkungan sangat berperan penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kupang. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Bapak Max Mahury, kondisi sosial yang semakin positif dan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan menjadi faktor pendukung utama, meskipun ketidakstabilan politik kerap kali mempengaruhi alokasi anggaran untuk program lingkungan. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bapak Achmad Likur, menambahkan bahwa kondisi ekonomi yang baik mempermudah partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah dan membuka peluang kemitraan dengan sektor swasta, meskipun terkadang regulasi yang belum jelas menjadi kendala. Sub Koordinator Substansi Penanganan Sampah, Bapak Meksy Pingak, menegaskan pentingnya dukungan sosial dan kesadaran masyarakat, walau ada tantangan dalam edukasi pada sebagian kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya memahami program. Pengawas lapangan, Ibu Munny Nenno, mengungkapkan bahwa meski dukungan sosial kuat, ketidakstabilan politik dan keterbatasan dana menjadi hambatan signifikan. Sementara itu, pelaksana di TPA juga melihat bahwa dukungan politik yang konsisten dan komitmen alokasi anggaran dari pemerintah sangat krusial untuk menarik investasi dan memperkuat program daur ulang. Secara keseluruhan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah sangat bergantung pada sinergi antara kondisi sosial, ekonomi, dan dukungan politik yang stabil serta berkelanjutan. Masyarakat yang sadar lingkungan dan kondisi ekonomi yang baik dapat mendorong partisipasi aktif dan membuka peluang pengembangan program yang lebih efektif.

2. Karakteristik Partisipan dan Sifat Opini Publik

Karakteristik partisipan dan sifat opini publik memegang peranan penting dalam keberhasilan program pengelolaan sampah di Kota Kupang. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Bapak Max Mahury, kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap lingkungan memberikan dukungan positif terhadap program tersebut, meskipun masih ada tantangan berupa skeptisisme dari beberapa kelompok yang belum sepenuhnya memahami kebijakan. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bapak Achmad Likur, menambahkan bahwa kondisi ekonomi yang relatif baik mendorong partisipasi masyarakat, tetapi perubahan kebijakan dan ketidakpastian politik sering kali menimbulkan keresahan dan penolakan yang memerlukan pendekatan edukasi lebih proaktif. Sub Koordinator Substansi Penanganan Sampah, Bapak Meksy Pingak, menegaskan perlunya pendekatan inklusif dan transparan guna mengatasi sikap skeptis serta pengaruh opini publik yang cepat berubah, sehingga komunikasi yang jelas menjadi sangat penting. Pengawas lapangan, Ibu Munny Nenno, juga mengamati adanya dukungan sekaligus keraguan masyarakat yang dipengaruhi oleh ketidakstabilan politik dan kekhawatiran dampak ekonomi lokal. Dari perspektif pelaksana di lapangan, seperti petugas TPA, meskipun dukungan terhadap kebijakan cukup kuat, opini publik sering kali dipengaruhi oleh berita negatif dan tekanan dari organisasi masyarakat maupun media sosial. Sementara itu, masyarakat di Kecamatan Maulafa, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yos Benu, menunjukkan peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan, namun masih terdapat kelompok yang belum merasa terlibat secara aktif dalam pengelolaan sampah, ditandai dengan adanya tumpukan sampah di beberapa lokasi. Dengan demikian, meski kesadaran sosial terus berkembang, tantangan dari segmen masyarakat yang skeptis dan ketidakpastian politik tetap harus diatasi. Pendekatan yang lebih inklusif, transparan, dan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengurangi keraguan serta meningkatkan

partisipasi masyarakat, sehingga keberhasilan program pengelolaan sampah dapat terwujud secara menyeluruh.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan penanganan sampah di Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, menunjukkan bahwa kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun sarana prasarana, serta tantangan dalam pelaksanaan SOP yang berpengaruh pada efektivitas kebijakan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Putri dan Yuliani (2024) di Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, yang juga menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas menjadi penghambat utama dalam pengelolaan sampah. Kedua penelitian tersebut menegaskan bahwa tanpa dukungan sumber daya yang memadai, efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah tidak dapat optimal.

Selain itu, aspek komunikasi dan partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan kebijakan penanganan sampah di Kecamatan Maulafa. Penelitian Supriatna et al. (2024) di Kota Cimahi menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif antara birokrasi dan masyarakat sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini menguatkan temuan di Kota Kupang yang menyebutkan perlunya komunikasi yang konsisten dan sosialisasi berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, komunikasi menjadi penghubung penting antara pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sampah secara efektif.

Temuan lain yang relevan adalah mengenai tingkat kesadaran masyarakat dan fasilitas pendukung yang masih perlu ditingkatkan. Al Khumairoh et al. (2024) dalam penelitiannya di TPA Jatibarang, Semarang, juga menemukan tantangan serupa terkait rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya fasilitas yang memadai. Penelitian Anda menegaskan pentingnya pelatihan dan edukasi masyarakat serta peningkatan infrastruktur untuk mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan, yang sejalan dengan hasil studi tersebut.

Selanjutnya, dari sisi inovasi dan partisipasi masyarakat, penelitian Anda menyoroti pentingnya pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam pengelolaan sampah organik dan daur ulang. Hal ini juga didukung oleh studi Ulhasanah et al. (2025) yang menekankan adaptabilitas individu dan dukungan teknologi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Pendekatan kolaboratif dan inovatif yang melibatkan berbagai pihak, seperti yang ditemukan dalam penelitian Fatmawati et al. (2022) dan Kubota et al. (2020), juga menjadi unsur penting yang sejalan dengan temuan di Kota Kupang untuk mendorong keberhasilan implementasi kebijakan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian di Kecamatan Maulafa Kota Kupang menegaskan kembali bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh faktor sumber daya, komunikasi, partisipasi masyarakat, dan dukungan infrastruktur. Temuan ini konsisten dengan berbagai penelitian terdahulu di berbagai daerah, yang menunjukkan pentingnya pendekatan menyeluruh dan sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lain agar kebijakan pengelolaan sampah dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan penanganan sampah di Kecamatan Maulafa sudah mengacu pada Peraturan Daerah yang berlaku dan telah menetapkan standar keberhasilan yang jelas, seperti pengurangan volume sampah, peningkatan tingkat daur ulang, dan kepuasan masyarakat. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait

keterbatasan sumber daya baik manusia maupun fasilitas pendukung, serta tantangan kondisi cuaca dan koordinasi antar pelaksana. Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam keberhasilan kebijakan ini, dengan kebutuhan pelatihan dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan agar dapat menghadapi tantangan teknis dan manajerial. Infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai juga menjadi faktor kunci dalam mendukung kelancaran pengelolaan sampah, meskipun masih ada kendala operasional yang perlu diatasi. Selain itu, komunikasi yang konsisten dan efektif antar pelaksana serta keterlibatan aktif masyarakat sangat menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Faktor sosial, ekonomi, dan politik juga berpengaruh besar, dimana kesadaran masyarakat yang meningkat dan dukungan ekonomi yang stabil dapat memperkuat keberhasilan program, sementara ketidakstabilan politik dan opini publik yang skeptis masih menjadi hambatan yang harus dikelola dengan pendekatan transparan dan inklusif. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan penanganan sampah di Kecamatan Maulafa sudah berjalan dengan baik dari sisi regulasi dan perencanaan, namun perlu peningkatan dalam aspek pelaksanaan teknis, sumber daya, dan komunikasi agar tujuan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan dapat tercapai dengan optimal.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, data yang digunakan sebagian besar berasal dari wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan beberapa pelaksana di lapangan, sehingga mungkin belum mencakup pandangan menyeluruh dari seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Maulafa. Kedua, penelitian ini lebih fokus pada aspek implementasi kebijakan dari sisi pelaksana, sehingga kurang menggali secara mendalam faktor eksternal seperti dampak sosial budaya yang lebih luas dan resistensi masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Ketiga, keterbatasan waktu dan sumber daya juga membatasi ruang lingkup penelitian, terutama dalam melakukan observasi langsung dan evaluasi jangka panjang terhadap efektivitas kebijakan.

Arah Masa Depan Penelitian

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi yang lebih komprehensif dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara lebih luas, termasuk kelompok masyarakat yang selama ini kurang terjangkau dalam program pengelolaan sampah. Penelitian mendatang juga dapat mengeksplorasi dampak sosial budaya dan perilaku masyarakat terkait pengelolaan sampah untuk menemukan pendekatan yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi. Selain itu, perlu adanya evaluasi jangka panjang yang melibatkan pengukuran kuantitatif terhadap dampak kebijakan terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Studi tentang inovasi teknologi dan model pengelolaan sampah yang ramah lingkungan juga sangat penting untuk dikembangkan guna mendukung keberlanjutan program penanganan sampah di Kota Kupang khususnya di Kecamatan Maulafa.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan Terimakasih dan apresiasi mendalam kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan akses dalam pengumpulan data penelitian. Penghargaan juga disampaikan kepada semua pihak yang berkontribusi dan mendukung kelancaran serta keberhasilan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Al Khumairoh, A. N. F., Purnaweni, H., & Herawati, A. R. (2024). Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di TPA Jatibarang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(2). <https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i2.43649>
- BPS Kota Kupang. (2023). *Jumlah penduduk Kota Kupang pertengahan tahun 2023*. <https://kupangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjg5IzI%3D/jumlah-penduduk--total-.html>
- Chook, J. W., Ferdin, A. E. J., & Lee, C.-H. (2024). Unmasking Malaysian preferences for effective plastic waste management: A choice experiment approach. *Journal of Material Cycles and Waste Management*, 26(1), 512–528. <https://doi.org/10.1007/s10163-023-01850-1>
- Fatmawati, F., Mustari, N., Haerana, H., Niswaty, R., & Abdillah, A. (2022). Waste bank policy implementation through collaborative approach: Comparative study—Makassar and Bantaeng, Indonesia. *Sustainability*, 14(13), 7974. <https://doi.org/10.3390/su14137974>
- Hamdi, H. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kubota, R., Horita, M., & Tasaki, T. (2020). Integration of community-based waste bank programs with the municipal solid-waste-management policy in Makassar, Indonesia. *Journal of Material Cycles and Waste Management*, 22(3), 928–937. <https://doi.org/10.1007/s10163-020-00969-9>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Makassar: Media Sahabat Cendekia.
- Puspita, K. A., Rachmawati, I., & Sampurna, H. (2023). "Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Terhadap Partisipasi Masyarakat Di Kota Sukabumi". Bandung: Unpas Journal <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i1.5807>
- Putri, U. K., & Yuliani, F. (2024). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, 1(11), 962–974. Retrieved from <https://jurnal.intekom.id/index.php/njms/article/view/489>
- Ridwan, R., & Tungka, N. F. (2024). *Metode Penelitian* (L. O. A. Dani, Ed.). Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.
- Sahupala, M. I. (2020). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya (Studi di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya). *Syntax Literate*, 5(4). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i4.1079>
- Simangunsong, F. (2017). *Metode Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). (2025). *Timbulan sampah tahun 2025*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>

- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, interpretif, interaktif dan konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyo-Basuki, W. (2006). *Metode penelitian kualitatif dalam pendidikan dan sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Supriatna, C., Susniwati, S., & Wiradiputra, I. A. (2024). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (JIUBJ)*, 24(1). <https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i1.4133>
- Ulhasanah, N., Suhardono, S., Lee, C.-H., Faza, A. S., Zahir, A., & Suryawan, I. W. K. (2025). Modelling participation in waste bank initiatives at public transport hubs to advance circular economy development. *Discover Sustainability*, 6(1), Article 153. <https://doi.org/10.1007/s43621-025-00940-4>
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Wachid, A., & Caesar, D. (2021). *Metode penelitian kualitatif: Pendekatan studi kasus*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zwane, M. I., & Schoeman, T. (2025). Training waste reclaimers in repairing and refurbishing small e-waste appliances. *Discover Sustainability*, 6(1), Article 87. <https://doi.org/10.1007/s43621-025-00857-y>

